

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah serta peran pemerintah pusat saling terkait saat pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwasanya “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [1]. Maka, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan daerahnya sesuai prinsip UUD 1945.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah federal memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam menetapkan sistem pemerintahan sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Jika diterapkan dengan benar, pemerintah daerah bisa mempercepat proses perbaikan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” [1].

Dengan terdapatnya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang, kebebasan hak, kewajiban serta tanggung jawab terhadap pemerintahan daerahnya sendiri dan mengelola anggaran sesuai dengan kemampuan daerahnya. Kapasitas dan kemauan pemerintah daerah untuk

mengembangkan daerah menentukan apakah suatu wilayah berhasil atau gagal. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya maka semakin cepat pula peningkatan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat.

Melalui laporan keuangan daerah, yang berfungsi sebagai kajian kinerja dan tolok ukur bagi pemerintah daerah, untuk menentukan kemajuan satu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dimana laporan keuangan pemerintah daerah memerinci status dan hasil keuangan suatu organisasi. APBD termasuk indikator yang baik mengenai seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah. APBD bisa dipakai sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga bisa memuat tujuan operasional keuangan pemerintah daerah, memerinci uang yang dikeluarkan untuk proyek dan kegiatan daerah pada tahun anggaran tertentu, dan mencantumkan uang yang dibawa untuk membayar seluruh uang tersebut.

Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan potensi yang dimiliki setiap pemerintah daerah diukur melalui kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Menurut Halim (2007), Kinerja keuangan termasuk satu dari indikator kemampuan daerah pada menjalankan otonomi daerah. Adapun kinerja keuangan pemerintah daerah bisa ditingkatkan secara signifikan dengan bantuan pemerintah daerah. Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dihasilkan dari peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti belanja daerah, pendapatan daerah, tingkat kekayaan, ukuran pemerintah (*size*), *leverage*, serta temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi determinan.

Tingginya penerimaan pendapatan daerah maka bisa memberikan pengaruh yang positif, menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah mampu menumbuhkan pendapatan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan juga bisa mencapai tujuan dari pemerintah daerah sehingga bisa berjalan dengan efektif. Semestinya semakin besar kemampuan finansial suatu daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan daerahnya.

Namun munculnya virus Covid-19 atau pandemi *Corona Vints Disease* pada tahun 2019 mengakibatkan krisis ekonomi bagi semua daerah yang ada di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari imbauan *social distancing* hingga penerapan PSBB di setiap daerah, untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Namun, eksekusi ini menimbulkan dampak pada banyak bidang, terutama perekonomian. Perubahan APBN Tahun 2020 dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan ruang fisik bagi orang dan barang untuk bergerak dan dunia usaha untuk beroperasi.

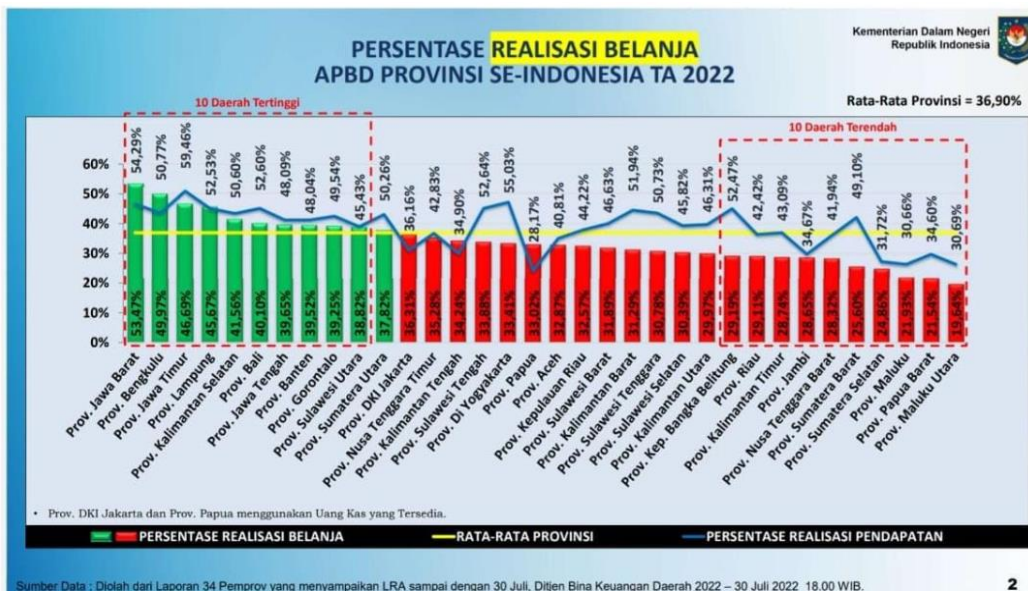
Wabah Covid-19 berdampak pada beberapa daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur yang mengalami keterpurukan perekonomian. Provinsi Jawa Timur telah melakukan sejumlah inisiatif kebijakan sosial dan ekonomi yang menghasilkan realokasi dan pengalihan APBD Jatim untuk menangani Covid-19 dengan lebih baik melalui penggunaan sumber daya di tingkat daerah yang lebih efektif. Kabupaten dan kota di Jawa Timur juga merasakan manfaat dari redistribusi dana tersebut [3].

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2018-2021

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH
2018	31.939.187.379.442,58	30.662.093.021.869,82
2019	33.455.209.327.986,57	33.967.109.632.815,13
2020	31.631.024.771.618,29	32.286.757.637.609,27
2021	34.280.709.120.323,71	33.852.938.529.603,57

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

Jika dilihat dari tabel diatas dari tahun 2018-2021 APBD Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya Covid-19. Sehingga penerimaan daerah dan Belanja daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan.



Gambar 1.1 Presentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Se Indonesia TA. 2022

Sumber : jatimprov.go.id

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada tahun 2022, realisasi pendapatan provinsi senilai Rp16,43 triliun dari target senilai Rp27,64 triliun (atau 59,46 persen), menjadikannya realisasi pendapatan paling tinggi di

tanah air. Hal ini berlandaskan data LRA per 30 Juli 2022 pada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri. Pemerintah provinsi Jawa Timur menghabiskan Rp13.751 triliun (atau 46,69%) dari anggaran berbasis LRA per 30 Juli 2022, menjadikannya peringkat ketiga terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat dan Bengkulu. Dengan kata lain,” Gubernur Khofifah mengatakan, menurut data SieKeuda, belanja Pemprov Jatim mencapai 14,529 triliun (48,98%). Berdasarkan data yang ada, APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2022 mendatang sebesar 29,454 triliun [4].

Berdasarkan fenomena pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2021 Realisasi Provinsi Jawa Timur sudah merealisasikan PAD selama tiga tahun berturut-turut melebihi dari target anggaran meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2017- 2021

No	Keterangan	Provinsi Jawa Timur				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anggaran	15.850.715.963.543,10	16.575.987.295.655,40	18.212.437.333.663,50	15.448.832.795.589,00	17.124.366.352.581,00
2.	Realisasi	17.324.177.664.424,20	18.531.062.021.823,30	19.327.125.485.405,90	17.950.996.508.801,00	18.935.885.925.145,60

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

Sekalipun wabah Covid-19 menyebabkan kemerosotan ekonomi pada tahun 2020, pendapatan asli daerah tetap melampaui target anggaran. Padahal realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jatim turun 7% pada 2020, dari 19,327 triliun menjadi 17,950 triliun. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5% dari tahun sebelumnya.

PAD yakni uang yang dihasilkan serta disimpan oleh daerah tersebut sesuai dengan aturan dan hukum. Selain itu menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “PAD yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan” [5]. Menurut Halim (2002), Segala pendapatan yang bersumber dari sumber perekonomian daerah disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain PAD, belanja daerah bisa memengaruhi kinerja keuangan daerah. Seluruh komitmen yang timbul di suatu daerah digolongkan sebagai belanja daerah dan dikurangkan dari nilai kekayaan bersih tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Modal Menurut Halim (2002), Belanja modal yakni uang yang dibelanjakan pada suatu wilayah yang mempunyai konsekuensi lebih dari satu tahun fiskal sehingga meningkatkan aset wilayah tersebut. Investasi mencakup hal-hal seperti membeli tanah, mesin, dan peralatan, membayar bangunan dan infrastruktur seperti jalan dan sistem irigasi, dan membelanjakan uang untuk hal-hal fisik lainnya seperti mesin dan peralatan (Halim, 2008).

Manfaat belanja modal dikatakan berhasil apabila tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik sesuai dengan kebutuhan daerah masing – masing. Serta mutu yang dihasilkan bisa terjamin baik. Dengan dilakukannya belanja modal bisa mencerminkan adanya pembangunan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdampak pada kehidupan masyarakat seperti adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Peningkatan belanja modal bisa membangun

infrastruktur yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mendukung pembangunan, dan merangsang perekonomian daerah.

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur T.A 2018 – 2021

No	Provinsi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Anggaran	3.385.425.612.437,00	3.391.075.425.108,00	3.279.042.817.256,81	2.284.845.579.345,04	2.418.101.833.529,23
2.	Realisasi	3.090.055.683.753,90	2.840.552.249.709,06	2.770.973.973.023,11	1.904.556.949.359,00	1.969.920.805.388,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan data diolah penulis, 2023

Realisasi belanja modal Pemprov Jatim pada tahun 2018 hingga tahun 2021 kurang dari target anggaran, berdasarkan fakta di atas. Realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami turunan yang cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Ratnasari & Meirini (2022), Hasil keuangan tidak dipengaruhi PAD, namun sangat dipengaruhi dana perimbangan serta SILPA, serta dipengaruhi positif oleh belanja modal. Hal ini bertentangan dengan temuan penelitian oleh Ningrat (2019), karena pengeluaran untuk perbaikan modal mempunyai dampak yang besar dan negatif terhadap keuntungan kota, sementara peningkatan pendapatan pajak mempunyai dampak yang cukup besar dan positif.

Peneliti tertarik meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2018 – 2022” berlandaskan latar belakang

informasi yang sudah diberikan diatas. Provinsi Jawa Timur dipilih dalam penelitian ini termasuk provinsi penghubung perekonomian Pulau Jawa serta berjumlah kabupaten dan kota terbanyak. Selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu indikator perekonomian.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang informasi yang sudah diberikan, maka telah dirumuskan permasalahan berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022 ?
2. Apakah terdapat Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni guna:

1. Mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 s/d Tahun 2022.
2. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dimaksudnya dari hasil penelitaian ini yakni :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan penelitian bisa diterapkan sebagai sumber atau saran dalam pemecahan masalah. Mengembangkan penelitian sebelumnya. Menjelaskan secara teoritis bagaimana pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksud bisa membantu mahasiswa dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik di pemerintah daerah, melengkapi prasyarat kelulusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Majapahit dan menyerahkan skripsi

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa memperoleh manfaat dari analisis keuangan pemerintah daerah berdasarkan PAD dan belanja modal. Untuk lebih mengembangkan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur baik Kabupaten/Kota, penelitian ini memberikan informasi bermanfaat bagi pemerintah yang bisa dijadikan acuan ketika mengambil keputusan atau menilai kinerja keuangan pemerintah daerah

3. Bagi Fakultas

Penelitian ini dimaksud bisa bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya bagi Fakultas Ekonomi khususnya pada program studi akuntansi.